



KR-Antara/Novrian Arbi

SEJUMLAH siswa belajar menguliti domba saat kegiatan edukasi penyembelihan dan pengolahan hewan kurban. Kegiatan ini diadakan SMA Darul Hikam Unggulan Bandung Jabar. Pengenalan penyembelihan dan pengolahan hewan kurban itu dimaksudkan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kepedulian, keikhlasan dan kesabaran siswa sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail.

Akhirussanah TK ABA Sukoharjo Kalasan

SLEMAN (KR) - Sebanyak 33 siswa TK ABA Sukoharjo Purwomartani Kalasan Sleman mengikuti akhirussanah atau wisuda purnasiswa tahun ajaran 2023/2024, Sabtu, (15/6). Seluruh peserta putra-putri mengenakan busana daerah.

Perwakilan Pimpinan

Cabang Aisyiyah (PCA) Kalasan Suprihati Handayani menyebutkan, merupakan langkah tepat orangtua menyekolahkan putra-putrinya di TKABA. "Meletakkan dasar yang kuat kepada putra-putri kita yang merupakan aset masa depan," kata Suprihati Handayani.

Sementara Kepala TK ABA Sukoharjo Yuni Lestari SPd AUD menjelaskan, jumlah siswa keseluruhan ada 60 anak. Dari jumlah itu, yang melanjutkan ke SD 33 anak. Menurutnya pendidikan di TK menjadi bekal masa untuk depan.

Sebelum wisuda, peserta terlebih dahulu mengikuti kirab. Kemudian penampilan angklung siswa yang sudah menorehkan prestasi menjadi juara ajang lomba angklung tingkat DIY Desember 2023. Prosesi wisuda dilakukan Kepala TK ABA Sukoharjo Yuni Lestari.

Acara juga dimeriahkan penampilan paduan suara dan beberapa peenari, pidato dan manyanyi.

(War)-f



KR-Warisman

Wisudawan TK ABA Sukoharjo foto bersama.

SOAL PENGGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN Kemendikbud Mestinya Ikut Jadi Penentu

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai, Indonesia tidak akan mengalami masalah kekurangan biaya pendidikan jika Kemendikbudristek ikut menjadi penentu penggunaan anggaran pendidikan.

"Saya yakin kalau Kemendikbudristek sebagai orang yang lebih paham dunia pendidikan, sudah menghitung biaya pendidikan, menjadi bagian penentu ketika uang itu dari kotak dibagi-bagi, saya yakin kita tidak kekurangan uang untuk membiayai pendidikan," kata Muhammad Nur dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan bersama Kemendikbudristek dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6). Selama Kemendikbud-

ristek tidak menjadi pihak penentu penggunaan anggaran pendidikan, ujarnya, biaya pendidikan di Indonesia akan terus mahal atau memberatkan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Lebih lanjut Nur menilai, penyelesaian persoalan biaya pendidikan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 80 dalam PP tersebut mengatur, pemerintah menetapkan be-

saran anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, tidak termasuk biaya pendidikan pendidikan. Berikutnya, disebutkan pula, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan. Sebelumnya, sempat ramai diberitakan sejumlah

kampus menaikkan UKT yang besar, seperti kenaikan dari UKT golongan empat ke golongan lima dan seterusnya dengan besaran rata-rata 5-10 persen. Hal tersebut menjadi polemik hingga terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa perguruan tinggi negeri pada sejumlah daerah.

Komisi X DPR lalu menindaklanjuti permasalahan itu dengan membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT itu. Meskipun Kemendikbudristek telah menyatakan membatalkan kenaikan UKT itu, Panja Pembiayaan Pendidikan tetap menelusuri penyebab mahal biaya tersebut. (Ant)-f

PBI UNY Gelar Pengabdian Masyarakat di Kebumen

YOGYA (KR) - Program studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Universitas Negeri Yogyakarta melaksanakan pengabdian masyarakat ke tiga titik lokasi di Kabupaten Kebumen, Juni ini. Daerah yang dituju yakni Kecamatan Kebumen, Gombang, dan Prembun dengan mengangkat tema besar 'Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Guru Bahasa Inggris Sekolah Menengah Pertama'.

Kegiatan luring yang dilaksanakan belum lama ini dihadiri dan dibuka oleh Kepala Disdikpora Kebumen Yanie Giat Setyawan SSos MAcc. Yanie sangat mengapresiasi niat dan praktik baik yang digagas seluruh dosen prodi PBI UNY melalui program pengabdian masyarakat. "Saya berharap kegiatan bermanfaat seperti ini dapat berlanjut untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang."

Sejalan dengan respons baik dari Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Inggris UNY Dr Ari Purnawan MPd MA yang menyatakan, sinergi para dosen PBI UNY dengan Disdikpora Kebumen, juga para peserta workshop berdampak baik dalam hal jalinan silaturahmi dan pemahaman akademik di era modernisasi ini.

"Antusias peserta workshop dalam pembelajaran berdiferensiasi membuat kami memetakan, subtopik relevan untuk mengakomodasi pengayaan materi bagi guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Semoga pada kesempatan selanjutnya, kami dapat kembali melaksanakan pengabdian masyarakat di sini," ujarnya.

Program pengabdian masyarakat ini dirancang secara matang dan efektif oleh seluruh dosen PBI

workshop berdampak baik dalam hal jalinan silaturahmi dan pemahaman akademik di era modernisasi ini.

"Antusias peserta workshop dalam pembelajaran berdiferensiasi membuat kami memetakan, subtopik relevan untuk mengakomodasi pengayaan materi bagi guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Semoga pada kesempatan selanjutnya, kami dapat kembali melaksanakan pengabdian masyarakat di sini," ujarnya.

Program pengabdian masyarakat ini dirancang secara matang dan efektif oleh seluruh dosen PBI

UNY, agar para guru sebagai pendidik dapat meregulasi sepenuhnya esensi dari pembelajaran berdiferensiasi untuk kebutuhan mengajar dalam rangka melaksanakan Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada inklusivitas, kemandirian dan penyesuaian terhadap kebutuhan individu siswa.

Workshop ini terbagi menjadi tiga tahap, yakni kegiatan praworkshop, tatap muka untuk paparan luring di sekolah, dan pascaworkshop yang melibatkan 122 peserta terdiri dari guru bahasa Inggris, kepala sekolah dan pengawas. (Hit)-f

EKONOMI

OBJEK WISATA HADAPI LIBUR SEKOLAH Utamakan Keselamatan Pengunjung

KUDUS (KR) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus Tengah, mengingatkan para pengelola objek wisata untuk memprioritaskan atau mengutamakan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata selama masa libur sekolah 2024.

"Sebagai langkah antisipasi, pengelola objek wisata harus memperhatikan daya tampung hingga manajemen berbagai risiko sebagai upaya mitigasi kecelakaan, kerawanan keamanan, serta keselamatan pengunjung," kata Kepala Disbudpar Kudus Mutrikah di Kudus, Selasa (18/6).

Untuk itu, katanya, melalui surat edaran yang disampaikan ke semua pengelola objek wisata, pihaknya menekankan untuk mengedepankan prinsip dan aksi sapta pesona di masing-masing wilayah yang harus selalu dijaga. Apalagi, pekan ini selain menghadapi cuti bersama dan memasuki masa libur sekolah, akan ada peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata.

Surat Edaran No 500.13/813 tentang Imbauan Kesiapan Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Menghadapi Cuti Bersama Idul Adha dan Libur Sekolah, katanya, tidak hanya diberikan kepada pengelola destinasi wisata, termasuk

kepada pengelola desa wisata maupun pengelola usaha pariwisata yang ada di wilayah Kudus.

"Kami juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata maupun desa wisata agar memberikan pelayanan prima kepada wisatawan yang bisa dilakukan," ujarnya.

Ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap risiko bencana alam dan non alam. Bisa dengan menyiapkan sarana dan prasarana, personel ataupun tim khusus dan juga selalu memutakhirkan berkala kondisi cuaca lewat situs Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Pengelola destinasi wisata, pintanya, juga harus memberikan informasi terkini terhadap daya tarik wisata yang dikelola kepada wisatawan yang bisa dilakukan secara daring ataupun luring.

Ia juga mengimbau pengelola destinasi wisata memperhatikan pengaturan dan pengelolaan parkir serta usaha-usaha UMKM di bidang kuliner, cenderamata, jasa, hingga sewa di sekitar daya tarik wisata, agar tidak merugikan wisatawan bersama pihak-pihak terkait.

"Secara berkala, kami juga melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berlibur ke Kudus," ujarnya (Ant)-f



KR-Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif

Pijar Park, salah satu objek wisata alam di Kabupaten Kudus, Jateng.

PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR Petani Sleman Terima Hibah KKP Rp 6,45 M

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman menyerahkan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar kepada 31 kelompok budidaya ikan. Penyerahan dilakukan Bupati Sleman Kustini di Umbul Sidomulyo Brintikan Tirtomartani Kalasan. Hibah sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar ini berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Plt Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono menyebutkan, jumlah bantuan KKP untuk Kabupaten Sleman tahun ini sebesar Rp 6,45 miliar. Bantuan ini kemudian diserahkan kepada 31 kelompok pembudidaya ikan air tawar, dan 1 Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (poklhasar).

"DAK dari KKP ini tidak

semua daerah mendapat. Selama ini di DIY hanya Kabupaten Sleman yang mendapatkan. Itu karena pertimbangan potensi dan pertimbangan lainnya. Ini perlu kita syukuri," ujarnya, Rabu (19/6).

Sarana budidaya ikan air tawar yang dihibahkan ada beberapa macam, di antaranya benih ikan, pakan ikan, papan nama, pompa air, motor roda tiga, timbangan digital duduk,



KR-Istimewa

Bupati Kustini melakukan penebaran benih ikan nilam dan ikan tawes di Sungai Opak.

pemotong rumput, pagar kolam galvalum, tanki/wadah ikan, tabung oksigen dan regulator.

Sementara Bupati Kustini berharap hibah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan kualitas dan hasil produksi

ikan air tawar di tempatnya masing-masing. Hasil budidaya ikan dari para penerima hibah nantinya juga dievaluasi oleh Pemkab Sleman. "Nanti kita evaluasi, kita adakan lomba. Untuk yang hasilnya bagus Dikasih hadiah," katanya. (Has)-f

KEMENPERIN BANTU IKM BATIK Jadi Produsen Seragam Haji Lewat Pembinaan

JAKARTA (KR) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantu industri kecil menengah (IKM) batik dalam negeri untuk menjadi produsen seragam haji melalui pembinaan standardisasi mutu produk.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi di Jakarta, Selasa (18/6) mengatakan, pembinaan standardisasi itu dilakukan lewat Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI), sehingga para pelaku IKM bisa memperoleh Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal, mengingat 236 juta penduduk di Tanah Air beragama Islam. "Peluang produk halal dalam negeri sangat potensial. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim kedua terbesar di dunia sebanyak 236 juta orang, juga menjadi pasar potensial bagi produk halal barang guna khususnya peralatan ibadah," ujarnya.

Adapun pembinaan standardisasi IKM batik itu dilakukan melalui

salah satu unit pelaksana teknis Kemenperin, yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil.

Kepala BBSPJI Tekstil Kemenperin Cahyadi menjelaskan, pembinaan tersebut bertujuan agar para pelaku IKM bisa memenuhi persyaratan standardisasi bahan baku dan teknologi proses produksi, bisa memiliki sertifikasi batikmark, memiliki atau dalam proses sertifikasi halal yang telah diajukan kepada BPJPH, bisa memiliki workshop atau tempat kerja untuk memproduksi serta bisa memiliki bukti kemampuan produksi batik cap. Menurutnya, pembi-

naan tersebut memberikan efisiensi terhadap IKM batik, karena membantu untuk memenuhi beberapa regulasi sekaligus, sehingga membuat pelaku industri yang lolos standardisasi meraih pasar produksi batik bagi pelaksanaan haji Indonesia.

"Kami mengedepankan solusi pembinaan industri terpadu yang memberikan manfaat efisiensi bagi IKM, sehingga IKM dapat memenuhi sekaligus beberapa regulasi dan standardisasi industri yang diminta user. Dengan strategi ini, tentu outputnya bisa lebih cepat, tepat sasaran dan lebih terjangkau," katanya. (Ant)-f